Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2025, 11 (8.B), 18-27
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11066
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Analisis Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Perikanan Tangkap Dalam Mempengaruhi Daya Saing Ekspor Perikanan Ditinjau Dari Asas Netralitas

Adilah Dzakiyah Lubis[1], Alicia Rayyannaira[2], Arifah Alya Ramanda[3], Azzahra Putri Firmansyah[4]

Universitas Indonesia[1234]

Received: 07 July 2025
Revised: 16 July 2025
Accepted: 23 July 2025

Abstract

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor perikanan tangkap di Indonesia menjadi tantangan signifikan bagi pengusaha, terutama karena berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan berkurangnya daya saing produk di pasar internasional. Studi ini mengevaluasi penerapan PBB berdasarkan asas netralitas perpajakan dan dampaknya terhadap efisiensi ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan sektor perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa beban PBB sering kali tidak mencerminkan produktivitas sebenarnya, sehingga menciptakan distorsi dalam keputusan investasi pengusaha. Dengan membandingkan kebijakan perpajakan di negara lain, seperti Norwegia, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan untuk memastikan daya saing ekspor perikanan Indonesia tetap terjaga. Rekomendasi diberikan untuk menerapkan sistem pajak yang lebih adil dan proporsional terhadap skala usaha serta mendorong inovasi di sektor ini.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan, Perikanan Tangkap, Daya Saing, Asas Netralitas, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Reformasi Perpajakan, Ekspor, Kebijakan Perpajakan*

(*) Corresponding Author: dzakiyahadilah@gmail.com, aliciarayyannaira19@gmail.com, arifahrmnd@gmail.com, azzahrasyaaa@gmail.com

How to Cite: Lubis, A., Rayyannaira, A., Ramanda, A., & Firmansyah, A. (2025). Analisis Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Atas Perikanan Tangkap Dalam Mempengaruhi Daya Saing Ekspor Perikanan Ditinjau Dari Asas Netralitas. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(8.B), 18-27. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11066.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekspor perikanan tangkap, menjadikannya salah satu sektor andalan bagi perekonomian nasional. Potensi ini perlu dimanfaatkan secara optimal. Upaya pemanfaatan yang maksimal menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta penerimaan negara, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pengembangan usaha di bidang perikanan, Indonesia memiliki peluang dan prospek yang sangat menjanjikan. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan diperkirakan bernilai sekitar USD 82 miliar per tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Negara tujuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Berat bersih : Ton						
Jepang	12.716,3	11.921,1	11.050,0	6.191,5	6.166,9	4.335,2	2.862,8
Malaysia	26.174,2	27.756,2	25.538,0	30.721,2	25.110,9	23.384,7	26.619,4
Singapura	20.014,5	24.181,6	22.081,6	22.924,4	19.760,3	18.143,6	17.528,1
Amerika Serikat	640,0	316,8	383,2	641,6	701,1	287,8	241,5
Taiwan	3.844,6	3.057,7	2.721,2	2.669,8	2.361,7	2.041,0	1.906,9
Arab Saudi	1,1	58,2	99,0	503,2	1.131,9	886,3	809,4
Hongkong	936,1	1.002,5	1.298,6	1.425,3	1.917,4	2.333,2	2.341,2
Tiongkok	13.919,7	8.740,4	3.202,6	461,0	1.121,3	897,9	1.725,7
Australia	571,2	710,8	457,4	552,3	432,5	378,8	367,4
Uni Emirat Arab	139,6	54,6	47,9	150,3	462,0	722,6	298,9
Lainnya	12.743,7	20.279,2	1.099,3	978,2	818,1	571,1	260,1
Jumlah	**91.701,1**	**98.079,0**	**67.978,8**	**67.218,5**	**59.984,0**	**53.982,2**	**54.961,4**

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023*.

Dengan potensi dan prospek yang tinggi, Negara mendapatkan penerimaan yang tinggi pula dari pemajakan atas perikanan tangkap tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Gunadi, semua pengusaha perikanan laut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bidang Perikanan Laut sesuai dengan UU PBB dan PNBP serta pungutan perikanan sesuai dengan UU Perikanan. Akan tetapi, dengan adanya beban PBB yang berlaku sejak tahun 2015 terhadap pelaku usaha perikanan tangkap yang terlalu tinggi dapat memberatkan perusahaan ikan tangkap yang sering kali memiliki margin keuntungan terbatas. Sebagaimana yang tertera di tabel di atas, bahwa jumlah ekspor ikan di Indonesia mengalami penurunan pasca kebijakan pengenaan PBB terhadap pelaku usaha perikanan tangkap diterapkan.

Melihat dari asas netralitas, kebijakan pengenaan PBB terhadap pelaku usaha perikanan tangkap sebaiknya dilakukan peninjauan kembali dengan mempertimbangkan dampak terhadap operasional perusahaan, terutama terkait penggunaan lahan dan fasilitas pendukung perikanan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian tarif PBB dalam jangka panjang agar perusahaan perikanan dapat merencanakan investasi dan operasinya tanpa menghadapi ketidakpastian beban pajak. Dengan demikian, penerapan PBB yang adil dan sesuai dengan asas netralitas akan memastikan bahwa pajak ini tidak mengganggu efisiensi ekonomi dan keberlanjutan perusahaan ikan tangkap.

POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana karakteristik bumi dan bangunan dalam sektor perikanan mempengaruhi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah penerapan PBB pada sektor perikanan sudah sesuai dengan asas netralitas dalam perpajakan?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan PBB pada sektor perikanan, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan sektor ini?

KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Berdasarkan William N. Dunn (2003:132), kebijakan publik merupakan kumpulan pilihan atau keputusan yang saling berkaitan dan dibuat oleh pemerintah, dengan ketergantungan antara satu dengan yang lain. Pilihan ini dapat berupa tindakan nyata atau keputusan untuk tidak melakukan tindakan, bergantung pada kondisi yang dihadapi. Sementara itu, menurut Knoepfel (dalam Dupuis dan Knoepfel, 2013), kebijakan publik

adalah rangkaian keputusan atau tindakan yang diambil secara sengaja oleh pemerintah, kadang melibatkan pihak swasta, dengan tujuan mengatasi masalah yang telah didefinisikan secara politik sebagai isu bersama. Dalam pengertian-pengertian tersebut, kebijakan publik dipahami sebagai sebuah pilihan atau tindakan kolektif yang dirancang oleh pemerintah.

Kebijakan publik sebaiknya memiliki beberapa elemen penting, yaitu memiliki tujuan yang jelas, mencakup tindakan atau pola tindakan dari pejabat pemerintah, melibatkan tindakan nyata oleh pemerintah, bersifat positif (dalam bentuk tindakan) maupun negatif (dalam bentuk keputusan untuk tidak bertindak), serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat (Widodo, 2001:190).

Kebijakan Pajak

Kebijakan pajak merujuk pada kebijakan fiskal dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu kebijakan yang mengatur siapa yang dikenakan pajak, bagaimana cara menghitung besaran pajak yang harus dibayar, serta prosedur pelaksanaannya (Mansury, 1994:37). Selain itu, menurut Musgrave (1958:35), terdapat dua aspek penting dalam kebijakan pajak: pertama, bagaimana aturan pajak dirancang; dan kedua, bagaimana tantangan administratif dalam pelaksanaan pajak diatasi agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Sama seperti kebijakan publik lainnya, kebijakan pajak juga memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Mansury (2000:5) menjelaskan bahwa tujuan utama kebijakan pajak adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, menciptakan distribusi pendapatan yang merata, serta menjaga stabilitas ekonomi. Dengan kebijakan pajak yang dirancang secara baik, negara dapat memastikan tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Konsep Pengenaan Pajak Properti

Menurut Rachmany (2003;1), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya jumlah pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak, bukan berdasarkan keadaan pemilik atau subjek pajak. Rachmany juga mendefinisikan pajak properti sebagai segala jenis pajak yang didasarkan pada kepemilikan, penggunaan, atau manfaat yang diperoleh dari berbagai jenis properti. Properti ini bisa berupa properti tak bergerak, sumber daya alam, maupun properti berwujud dan tidak berwujud.

Pajak properti dalam konteks PBB mengacu pada kelompok pajak yang dikenakan berdasarkan nilai dari berbagai jenis properti, dikenal dengan istilah *ad valorem*. Pajak properti ini mencakup dua jenis utama, yaitu pajak properti riil (yang dikenakan atas tanah dan bangunan di atasnya) dan pajak properti personal (yang dikenakan atas properti berwujud seperti perabot dan peralatan, hewan, serta properti tidak berwujud seperti uang dan saham) (Suharno, 2003, 13). Berdasarkan definisi tersebut, pajak properti bisa dianggap sebagai pajak atas pemanfaatan dari bumi dan/atau bangunan, termasuk kegiatan seperti penangkapan ikan.

Daya Saing

Menurut Porter (2008), daya saing merujuk pada kemampuan atau keunggulan yang dimanfaatkan untuk berkompetisi di pasar tertentu. Daya saing ini berkaitan dengan produktivitas, yang diukur melalui tingkat output yang dihasilkan dari setiap input yang digunakan. Peningkatan produktivitas tersebut dapat terjadi karena bertambahnya jumlah input fisik seperti modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input, serta kemajuan teknologi.

Sementara itu, Muhardi (2007) mengemukakan bahwa dimensi daya saing meliputi biaya (cost), kualitas (quality), ketepatan waktu penyajian (delivery), dan fleksibilitas (flexibility). Secara umum, daya saing dapat dipahami sebagai kemampuan suatu industri untuk menunjukkan keunggulan dalam aspek-aspek tertentu, dengan cara menciptakan situasi

yang paling menguntungkan serta menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan industri lainnya.

Ekspor

Ekspor adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengiriman barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri dengan tujuan memperluas pasar dan meningkatkan devisa negara. Menurut Todaro (2003), ekspor merupakan salah satu strategi penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan suatu negara, sedangkan Krugman dan Obstfeld (2009) menekankan bahwa ekspor terjadi karena adanya keunggulan komparatif dan daya saing yang dimiliki oleh negara. Ekspor juga berfungsi sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi langsung pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan utama dari ekspor adalah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui devisa dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Melalui ekspor, produsen dalam negeri dapat memperluas pasar mereka ke luar negeri, yang mendorong peningkatan produksi dan memperbaiki neraca perdagangan. Selain itu, ekspor juga memberikan manfaat dalam hal penguatan daya saing produk lokal di pasar internasional serta memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki.

Asas Netralitas (*Neutrality*)

Salah satu asas pajak, berupa asas netralitas yang mengidentifikasikan bahwa pajak seharusnya terlepas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap produksi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya (Rosdiana & Irianto, 2012). Hal ini menjelaskan bahwa seharusnya pajak tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi produsen dalam memproduksi suatu barang dan/atau jasa serta tidak mempengaruhi seseorang untuk menghasilkan penghasilan karena tujuan pemungutan pajak adalah meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah tidak bisa hanya serta merta menaikkan tarif pajak. Bahkan dengan kenaikan tarif pajak, penerimaan pajak dapat menurun.

Dengan adanya asas netralitas, Indonesia menerapkan hibridisasi antara *income-based taxation* dengan *consumption-based taxation* yang memperbolehkan iuran pensiun sebagai beban fiskal yang nantinya akan mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas netralitas dalam kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pemerintah juga dapat menghindari potensi distorsi pasar yang tidak diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Industri Perikanan Tangkap

Industri perikanan tangkap memiliki beberapa karakteristik khas yang membedakannya dari sektor lain. Industri ini sangat bergantung pada sumber daya alam, yaitu ketersediaan stok ikan di perairan yang terbarukan. Akan tetapi, membutuhkan pengelolaan berkelanjutan agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan. Variabilitas dan ketidakpastian adalah hal yang lazim karena jumlah stok ikan yang sering tidak ditentukan akibat faktor alam seperti cuaca, suhu air, migrasi ikan, dan perubahan iklim, sehingga hasil tangkapan dan pendapatan tidak selalu dapat diprediksi. Industri ini juga memiliki sifat musiman, di mana penangkapan ikan banyak terjadi pada periode tertentu dalam setahun sesuai pola migrasi ikan.

Tidak hanya itu, industri ini memerlukan intensitas modal yang tinggi, terutama untuk kapal penangkap ikan, peralatan, teknologi navigasi, dan sistem penyimpanan dengan biaya operasional yang cukup besar, seperti bahan bakar. Regulasi yang ketat, baik dari aturan nasional maupun internasional, juga membatasi jumlah tangkapan, ukuran kapal, dan alat

tangkap yang diperbolehkan demi menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Pola kepemilikan dalam industri ini bervariasi, mulai dari nelayan kecil yang mengoperasikan kapal sendiri hingga perusahaan besar yang memiliki armada besar.

Industri perikanan tangkap terhubung erat dengan pasar global, terutama untuk ikan bernilai tinggi seperti tuna, sehingga perubahan permintaan dan harga internasional berdampak signifikan terhadap pendapatan. Namun, industri ini juga menghadapi risiko lingkungan seperti degradasi ekosistem laut dan penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebih dan pencemaran. Banyak nelayan yang terlibat di dalamnya memiliki keterampilan tradisional, namun perkembangan teknologi menuntut keterampilan teknis yang lebih modern. Secara sosial dan ekonomi, industri ini merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir, khususnya di negara berkembang, sehingga keberlanjutan sektor ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal.

Pengenaan PBB pada Perikanan Tangkap

Dasar Hukum dan Objek Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 menetapkan landasan hukum yang jelas untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk PBB atas sektor lainnya. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, objek PBB sektor lainnya mencakup bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional. Salah satu sektor yang menjadi objek pajak ini adalah perikanan tangkap yang beroperasi dalam wilayah perairan lepas pantai. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menggarisbawahi bahwa perairan yang digunakan untuk perikanan tangkap secara eksplisit termasuk dalam objek bumi yang dikenakan PBB. Lebih lanjut, dalam Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa objek pajak untuk perikanan tangkap meliputi usaha yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan dari kementerian terkait. Dengan demikian, pelaku usaha yang memanfaatkan wilayah perairan untuk kegiatan penangkapan ikan akan dikenakan pajak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terkait dengan luas dan penggunaan bumi tersebut.

Metode Penilaian dan Penghitungan PBB

Berdasarkan ketentuan dalam PER-20/PJ/2015 mengenai Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor lain, termasuk sektor perikanan, penghitungan pajak dilakukan dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam kegiatan perikanan tangkap, pengenaan PBB didasarkan pada NJOP bumi. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan luas bumi dengan NJOP bumi per meter persegi, di mana luas bumi dihitung berdasarkan jumlah kapal dan luas wilayah penangkapan ikan yang digunakan oleh setiap kapal.

Jika terdapat hasil produksi, nilai bumi dihitung dengan membagi nilai bumi dengan luas lahan, lalu dikalikan dengan pendapatan bersih dari produksi selama satu tahun sebelum tahun pajak. Pendapatan bersih ini didapatkan dengan mengurangi pendapatan kotor produksi yang merupakan hasil perkalian antara harga jual rata-rata dengan volume produksi dengan total biaya produksi selama setahun. Biaya produksi dihitung dengan menggunakan rasio tertentu yang diterapkan pada pendapatan kotor. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan Angka Kapitalisasi yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Dengan pendekatan ini, penghitungan pajak dalam usaha perikanan tangkap memperhitungkan hasil tangkapan serta efisiensi operasional kegiatan usaha.

Analisis Penerapan Asas Netralitas

Dampak PBB terhadap Efisiensi Ekonomi Sektor Perikanan

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor perikanan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi ekonomi para pelaku usaha, baik dalam kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya. Secara umum, PBB dikenakan berdasarkan Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) bumi, yang dihitung berdasarkan luas lahan atau area operasional perikanan. Namun, struktur pengenaan pajak ini sering kali tidak mencerminkan produktivitas nyata dari usaha perikanan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang menghadapi beban pajak yang relatif tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Distorsi ekonomi ini dapat mempengaruhi keputusan penting pengusaha dalam mengalokasikan sumber daya atau mempertahankan operasi di sektor tersebut.

Salah satu bentuk distorsi yang sering terjadi adalah pengalihan usaha ke sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan atau memiliki beban pajak lebih rendah. Misalnya, para pelaku usaha kecil di sektor perikanan tangkap mungkin mempertimbangkan untuk mengurangi skala usahanya atau bahkan berpindah ke sektor lain seperti perdagangan atau jasa yang tidak memiliki beban pajak bumi yang besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020 terdapat 101 perusahaan perikanan tangkap, sementara sektor perikanan budidaya memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu 283 perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor budidaya, yang biasanya menggunakan lahan lebih kecil dan terukur, lebih diminati karena dianggap lebih stabil dalam hal pajak dan biaya.

Dalam perikanan tangkap, pengusaha seringkali menghadapi ketidakpastian mengenai perhitungan PBB. Nilai NJOP bumi yang tinggi, khususnya di daerah pesisir dengan nilai lahan yang mahal, menyebabkan beban pajak yang signifikan. Menurut Muhamad Taufik dalam penelitiannya, banyak usaha kecil di sektor ini terpaksa mengurangi kegiatan usaha atau melakukan efisiensi yang ketat untuk menutupi beban pajak. Hal ini semakin diperburuk jika hasil tangkapan ikan tidak stabil, sementara kewajiban pajak tetap harus dibayarkan. Akibatnya, pengusaha yang tidak mampu menanggung biaya ini terpaksa mengurangi investasi mereka di sektor perikanan.

Di sisi lain, usaha perikanan budidaya lebih dipengaruhi oleh izin penggunaan lahan yang digunakan untuk menentukan luas bumi yang dikenai pajak. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur, sektor ini berkembang lebih pesat karena luas lahan yang digunakan lebih mudah dikendalikan dan lebih rendah dibandingkan usaha perikanan tangkap. BPS menunjukkan bahwa wilayah ini mendominasi produksi budidaya ikan di Indonesia, yang menandakan bahwa beban pajak di sektor ini lebih manageable. Namun, tetap ada kekhawatiran terkait beban PBB yang tidak seimbang dengan hasil produksi, terutama jika nilai NJOP bumi terus meningkat.

Beban PBB yang tidak proporsional dengan skala produksi juga dapat mempengaruhi efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. Usaha perikanan skala kecil yang tidak mampu mengikuti kenaikan nilai NJOP mungkin menghadapi penurunan daya saing dan akhirnya terpaksa gulung tikar. Hal ini dapat mengurangi kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Pada gilirannya, pengurangan investasi di sektor perikanan akan berdampak pada rantai pasok dan ketersediaan ikan sebagai komoditas pangan utama.

Jika pengenaan PBB dapat disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari sektor perikanan, distorsi ekonomi ini dapat diminimalisir. Penyesuaian pajak yang mempertimbangkan skala usaha dan produktivitas sebenarnya dari lahan perikanan akan membantu menjaga efisiensi dan kelangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil yang lebih rentan terhadap kenaikan pajak. Pemerintah juga dapat mengevaluasi kembali kebijakan perpajakan di sektor ini untuk memastikan bahwa beban pajak tidak menjadi penghalang dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, meskipun PBB adalah instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, pengenaan yang tidak proporsional dapat menyebabkan distorsi dalam keputusan ekonomi pelaku usaha perikanan. Pengusaha yang merasa terbebani oleh pajak ini mungkin terpaksa mengurangi kegiatan usahanya, beralih ke sektor lain, atau bahkan berhenti

beroperasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efisiensi dan perkembangan sektor perikanan itu sendiri.

Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Pengusaha Perikanan Tangkap

Dalam industri perikanan tangkap, pengusaha menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang kompleks, yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka. Di tengah upaya untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, faktor-faktor seperti perubahan iklim, penurunan populasi ikan, serta regulasi yang ketat menjadi tantangan tersendiri. Salah satu tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha perikanan tangkap ialah adanya praktik illegal fishing yang masih marak terjadi. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing menciptakan ketidakadilan bagi pengusaha yang mematuhi peraturan. Mereka yang beroperasi secara legal harus bersaing dengan pelaku ilegal yang tidak terikat oleh kewajiban perpajakan dan regulasi, sehingga menggerus daya saing mereka di pasar.

Selain itu bentuk tantangan yang harus dihadapi ialah pengenaan pungutan pajak yang bervariasi. Pengusaha Perikanan Tangkap dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas jumlah kapal dan luas area penangkapan ikan per kapal, hal ini sering kali tidak mempertimbangkan kondisi finansial pengusaha, terutama bagi mereka yang beroperasi dalam skala kecil. Dengan pungutan PBB yang tinggi dapat menggerus pendapatan pengusaha, sehingga mereka kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya bagi pengembangan usaha, perbaikan fasilitas, dan peningkatan kualitas produk. Selain PBB, Pengusaha Perikanan Tangkap dikenakan pengenaan atas Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi hambatan yang tidak kalah serius. Pengenaan PNBP pada sektor perikanan dapat membatasi potensi ekspor dan pertumbuhan usaha. Pengusaha terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Situasi ini berpotensi menyebabkan penurunan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

Pungutan-pungutan lain yang dikenakan, seperti biaya izin usaha dan sertifikasi, semakin memperberat beban pengusaha. Proses yang tidak transparan dan biaya yang tidak terduga sering kali menciptakan ketidakpastian bagi pengusaha yang ingin berinvestasi. Ketidakpastian ini dapat menghalangi masuknya modal baru ke dalam sektor perikanan, sehingga inovasi dan peningkatan kualitas produk menjadi terhambat. Dengan adanya beban tambahan ini, banyak pengusaha yang enggan untuk mengambil risiko dan lebih memilih untuk tetap berada dalam zona nyaman mereka.

Dalam asas netralitas pada sistem perpajakan seharusnya menjadi pedoman yang harus dipegang oleh pemerintah. Pajak seharusnya tidak menciptakan distorsi yang mempengaruhi keputusan ekonomi pengusaha. Pada sektor perikanan, beban pajak yang berat seharusnya tidak mengubah pilihan produsen dalam memproduksi, maupun mempengaruhi individu untuk menghasilkan penghasilan. Namun, kenyataannya, hal ini dapat membuat pengusaha merasa terpaksa mengubah strategi bisnis mereka akibat beban pungutan yang tidak adil, yang tentunya bertentangan dengan prinsip netralitas tersebut.

Pengaruh PBB terhadap Daya Saing Ekspor Perikanan

Analisis Pengenaan PBB dalam Biaya Produksi dan Implikasinya terhadap Harga Jual Produk Ekspor

Biaya produksi dalam sektor perikanan tangkap diantaranya seperti bahan bakar, gaji awak kapal, perawatan kapal, dan lainnya. Dengan tambahan beban PBB, biaya tetap atau *overhead* yang ditanggung oleh pengusaha akan meningkat. Kenaikan biaya ini akan

berimbas pada meningkatnya biaya per kilogram hasil tangkapan yang kemudian berdampak pada harga jual. Berikut simulasi perhitungan sederhana untuk melihat pengaruhnya:
Asumsi usaha perikanan tangkap telah diberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan telah berproduksi. Hasil tangkapan tahunan sebesar 500 ton ikan dengan pendapatan Kotor Rp 8.000.000.000 dan biaya produksi tanpa PBB sebesar Rp 2.400.000.000 (70%)
Perhitungan PBB:

- Pendapatan Bersih= Rp 8.000.000.000 - Rp 2.400.000.000= Rp 5.600.000.000
- NJOP= Rp 5.600.000.000 x 10 (KEP - 126/PJ/2015)= Rp 56.000.000.000
- NJKP= 40% x Rp 56.000.000.000= Rp 22.400.000.000
- PBB terutang= 0,5% (Pasal 41 UU HKPD) x Rp 22.400.000.000= Rp 112.000.000

Dampak terhadap Biaya Produksi:

- Total biaya produksi dengan PBB= Rp 2.400.000.000 + Rp 112.000.000
  = Rp 2.512.000.000
- Biaya produksi per ton ikan tanpa PBB= Rp 2.400.000.000 ÷ 500 ton
  = Rp 4.800.000 per ton
- Biaya produksi per ton ikan dengan PBB= Rp 2.512.000.000 ÷ 500 ton
  = Rp 5.024.000 per ton

Selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pengusaha perikanan tangkap di Indonesia juga dihadapkan pada berbagai pungutan lain, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya izin usaha, dan sertifikasi, yang meningkatkan biaya produksi. Untuk menutupi tambahan biaya ini, pengusaha sering kali menaikkan harga jual produk, yang dapat berdampak negatif pada daya saing di pasar internasional. Dalam pasar ekspor yang sangat kompetitif, kenaikan harga ini membuat produk perikanan Indonesia kurang menarik dibandingkan dengan produk dari negara lain yang memiliki struktur pungutan yang lebih ringan. Hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi negara lain, sementara pengusaha Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tetap bersaing secara global.

Dampak PBB terhadap Daya Saing Pengusaha Perikanan Tangkap di Pasar Global

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tantangan signifikan bagi pengusaha perikanan tangkap di Indonesia, yang berdampak langsung pada daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini terjadi meskipun sektor perikanan tangkap berperan penting dalam mendukung ekspor nasional, ketahanan pangan, dan peningkatan pendapatan negara. Beban pungutan yang beragam memaksa pengusaha untuk mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk membayar kewajiban pajak, sehingga mengurangi dana yang dapat digunakan untuk inovasi, peningkatan teknologi, dan pengembangan kapasitas produksi.

Dalam persaingan global yang semakin ketat, pengusaha perikanan dituntut untuk terus beradaptasi dan menggunakan teknologi terbaru guna meningkatkan efisiensi operasional serta kualitas produk. Namun, beban pajak yang meningkat membuat anggaran untuk penelitian dan pengembangan menjadi terbatas. Kurangnya inovasi dapat mengakibatkan produk lokal kehilangan daya saing dibandingkan dengan produk negara lain yang telah mengadopsi teknologi lebih canggih dan efisien.

Berbeda dengan Norwegia, sektor perikanan di negara tersebut hanya dikenakan pajak Resource Rent Tax (RRT). RRT adalah sistem perpajakan yang dirancang untuk pengelolaan sumber daya alam secara efisien, sederhana, dan praktis. Pajak ini diterapkan pada keuntungan yang diperoleh pengusaha setelah ambang batas internal rate of return (IRR) dalam arus kas telah tercapai. Dengan demikian, pengusaha perikanan tangkap di Norwegia hanya dikenai beban pajak berdasarkan nilai bersih (NPV), yang membantu mengurangi distorsi dalam investasi. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi dan keberlanjutan.

Melalui investasi yang signifikan dalam teknologi dan praktik ramah lingkungan, pengusaha perikanan tangkap di Norwegia tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi, tetapi juga mempertahankan posisi mereka sebagai salah satu eksportir ikan terbesar di dunia. Sebaliknya, pengusaha perikanan di Indonesia menghadapi beban pungutan yang lebih berat dan tantangan besar akibat praktik ilegal seperti penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar global.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada sektor perikanan tangkap di Indonesia berdampak signifikan terhadap peningkatan biaya operasional usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang rendah. Beban PBB yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak selalu mencerminkan produktivitas atau kapasitas usaha perikanan yang sebenarnya. Akibatnya, pengusaha harus menanggung beban pajak yang tinggi, yang kemudian mempengaruhi harga jual produk perikanan di pasar internasional. Kondisi ini menurunkan daya saing produk ekspor perikanan Indonesia di pasar global, di mana pelaku usaha perikanan dari negara lain mungkin tidak menghadapi beban pajak serupa.

Di sisi lain, kebijakan perpajakan saat ini juga menciptakan distorsi dalam keputusan ekonomi para pengusaha. Pelaku usaha perikanan tangkap terpaksa mengalokasikan sumber daya mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mengurangi kapasitas untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi, atau ekspansi usaha. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kinerja usaha secara langsung, tetapi juga dapat menghambat inovasi di sektor perikanan yang sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan teknologi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakstabilan stok ikan.

Dari perspektif asas netralitas, penerapan PBB pada sektor perikanan tangkap saat ini belum optimal. Pajak yang seharusnya netral dan tidak mempengaruhi keputusan ekonomi justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui reformasi kebijakan yang lebih adil dan proporsional, industri perikanan tangkap Indonesia berisiko kehilangan daya saingnya, sementara dampak negatif dari kebijakan pajak ini akan semakin dirasakan oleh pengusaha kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan.

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, pemerintah sebaiknya menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan netral bagi sektor perikanan tangkap yang mendukung keberlanjutan usaha dan daya saing di pasar internasional. Reformasi perpajakan terkait PBB sebaiknya dilakukan agar lebih proporsional terhadap kondisi industri dan daya saing ekspor, misalnya dengan mempertimbangkan skala usaha dan produktivitas nyata dari pelaku usaha perikanan. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengenaan pajak, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah merencanakan investasi dan operasional mereka tanpa merasa terbebani oleh ketidakpastian.

DAFTAR PUSTAKA

Mansury, R (1994), Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Objek, NJOP, dan Perhitungan PBB P5L. (2022). Oktober 2, 2024. https://www.pajak.com.

Jeli Bedakan Dua Jenis Pajak Bumi dan Bangunan. (2023). Oktober 2, 2024. https://opini.kemenkeu.go.id.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 126/PJ/2015 tentang Penetapan Nilai Bumi Per Meter Persegi, Rasio Biaya Produksi, Angka Kapitalisasi, dan Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal, Untuk Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya.

Rosdiana, H & Irianto, E. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aris Widagdo: Tantangan perikanan tangkap Indonesia. (2020, January 15). http://trobosaqua.com/detail-berita/2020/01/15/14/12588/aris-widagdo-tantangan-perikanan-tangkap-indonesia

Taufik, M. (2023). Pengaruh PBB pada sektor perikanan (Skripsi). Politeknik Keuangan Negara STAN.

Brodjonegoro, B. (2021). Reformasi perpajakan dan keadilan ekonomi. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Damanhuri, D. (2020). Dampak kebijakan pajak terhadap UMKM dan sektor produktif. Diskusi Ekonomi Nasional, Institut Pertanian Bogor.

Basri, F. (2022). Pajak dan tantangan ekonomi sektor perikanan di Indonesia. Artikel diterbitkan di Harian Ekonomi Indonesia.

Pusat Kebijakan APBN. (2018). PNBP sektor kelautan dan perikanan berbasis sumberdaya alam: tata kelola dan optimalisasinya. *Badan Kebijakan Fiskal RI*, 161. www.journal.uta45jakarta.ac.id